

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu aset terbesar penunjang perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Soebagio, pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Dari peraturan tersebut maka dibutuhkan pengelolaan yang optimal dari destinasi pariwisata agar tercapai tujuan-tujuan yang disebutkan diatas.

¹Isdarmanto, 2017. Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata. Gerbang Media Aksara. Yogyakarta

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan lautan yang luas menyimpan banyak keindahan di dalamnya. Keindahan ini terdiri dari beragam jenis yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pariwisata. Apabila beragam potensi tersebut mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka bukan hal yang mustahil jika pariwisata bisa menjadi suatu aset berharga yang dapat mewujudkan kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi pariwisata baik dari keindahan alam maupun budaya. Terkenal dengan keramahannya, masyarakat Sumatera Barat mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Belum lagi makanan yang beragam dan umumnya selalu cocok bagi setiap lidah yang mencobanya. Dengan beragam keunikan tersebut, menjadikan Sumatera Barat memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri bagi para pengunjung baik domestik maupun mancanegara untuk selalu datang dan mengunjungi Sumatera Barat. Tak heran jika jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Oktober 2023 mencapai 4.925 kunjungan.²

Salah satu daerah di Sumatera Barat yang menyimpan potensi pariwisata adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota menawarkan berbagai budaya, adat, tradisi dan wisata yang tidak kalah menarik dari daerah lain. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan jumlah 798.701 orang menjadi berjumlah 954.782 orang pada tahun 2022. Dengan demikian berarti mengalami peningkatan sebesar 19,54% dari tahun sebelumnya.³ Adanya peningkatan jumlah kunjungan ini

²Data Badan Pusat Statistik Tahun 2023

³LKJIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

dikarenakan munculnya objek-objek wisata baru yang kekinian dan diminati kebanyakan oleh kaum milenial.

Terdapat beberapa destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan destinasi yang banyak ini menjadikan masing-masing saling berpacu untuk meningkatkan kualitasnya baik dari segi tempat, fasilitas, sarana prasarana maupun pelayanan yang diberikan. Hal ini dilakukan agar pengunjung bisa betah saat berada di destinasi wisata dan juga merekomendasikan kepada orang lain untuk mengunjungi destinasi tersebut. Maka diharapkan pengunjung yang datang pun akan meningkat. Berikut destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 1.1 Data Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi	Jarak Tempuh	Fasilitas Objek
1.	Lembah Harau	Alam	Harau	6,5 km	Kolam Pemandian, Toilet, Mushola, Sepeda Air, Taman Bermain Anak, Kios, Parkir, Gazebo
2.	Sarasah Tanggo	Alam	Sarilamak	6 km	Kolam Pancing
3.	Kelok Sambilan	Alam	Hulu air	10,5 km	Mushola, Toilet
4.	Rest Area	Alam	Hulu air	12 km	Mushola, Toilet, Kios
5.	Kapalo Banda	Alam	Tanjung Ateh	12,5 km	Mushola, Toilet, Kios, Parkir
6.	Taman Anak Aka Barayun	Alam	Harau	6,5 km	Mushola, Toilet, Parkir, Gazebo, Kios, Sepeda Air
7.	Pemandian Batang Tabik	Alam	Batang Tabik	15 km	Mushola, Toilet, Kios, Kamar Ganti, Parkir
8.	Air Panas Batu Balang	Alam	Koto Kociak	6,5 km	-

9.	Bukik Bulek	Alam	Parak Baru	9,5 km	-
10.	Goa Aia Lului	Alam	Lubuak Limpato	34 km	-
11.	Sarasah Talang	Alam	Tarantang	5 km	-
12.	Ngalau Seribu	Alam	Harau	8,5 km	-
13.	Puncak Gunung Bungsu	Alam	Tungka	15 km	-
14.	Bukik Lontiak	Alam	Tungka	14 km	-
15.	Tungka View	Alam	Tungka	14 km	-
16.	Panorama Bukik Tapuang	Alam	Bukik Tapuang	13,5 km	-
17.	Aia Sonsang	Alam	Pabatungan	15 km	-
18.	Ngalau Malanteh	Alam	Padang Panjang	19 km	-
19.	Puritizana	Alam	Kapalo Bukik	31,5 km	-
20.	Ngalau gunung Kambing	Alam	Atas Laban	26 km	-
21.	Kawasan Simona	Alam	Tanjung Bungo	18 km	-
22.	Aia Terjun Sialang Indah	Alam	Sialang	17,5 km	-
23.	Ngalau Galamadin	Alam	Tanjung Haro Utara	31,5 km	-
24.	Ngalau Hantu	Alam	Lareh Nan Panjang	17,5 km	-
25.	Pemandian Aia Baba	Alam	Aia Baba	62 km	-
26.	Goa Sago	Alam	Tanjung Haro	32 km	-

27.	Bukik Posuak Maek	Alam	Maek	34 km	-
28.	Panorama Kurai	Alam	Kurai	61 km	-
29.	Air Terjun Singkapau	Alam	Suliki	12 km	-
30.	Goa Imam Bonjol	Alam	Palang Kitang	106 km	-
31.	Panorama Selat Malaka	Alam	Simpang Tigo	75 km	-
32.	Air Panas Muaro Paiti	Alam	Durian Tinggi	15,5 km	-
33.	Genangan Waduk PLTA	Alam	Tanjung Balik	13 km	-
34.	Makam Syekh Piobang	Sejarah	Gando	12 km	Mushola, Toilet
35.	Menhir Batu Nan Limo	Sejarah	Batu Nan Limo	14 km	Toilet
36.	Benteng Tuanku Nan Garang	Sejarah	Tigo Balai	24,5 km	Gazebo
37.	Makam Saleh Abdul Rahman Batu Hampar	Sejarah	Batu Hampa	28 km	Mushola, Toilet, Parkir
38.	Tugu PDRI Tanjung Gadang	Sejarah	Parak Lubang	6 km	Parkir
39.	Kuburan Keramat/ Surau Tuo Taram	Sejarah	Parak Baru	16 km	Mushola, Toilet, Parkir
40.	Museum	Sejarah	Balubuih	60 km	Toilet

	Arkeologi Belubus				
41.	Makam Syekh Abbas Abdullah Pdg Jopang	Sejarah	Padang Jopang	41 km	Mushola, Toilet, Parkir
42.	Talempong Batu	Sejarah	Talang Anau	53,5 km	Mushola, Toilet, Parkir
43.	Rumah Tuo Tan Malaka	Sejarah	Ikan Banyak	102 km	Toilet
44.	Tugu PDRI Koto Tinggi	Sejarah	Pasa Koto Tinggi	19 km	Mushola, Toilet, Parkir
45.	Batu Munjung	Sejarah	Tigo Balai	19,5 km	-
46.	Makam Pahlawan Situjuah Batua	Sejarah	Lurah Kincia	62 km	-
47.	Kawasan Menhir Maek	Sejarah	Koto Tinggi	8,5 km	-
48.	Menhir Gurun	Sejarah	Gurun	19,5 km	-
49.	Batu Basurek Koto Lamo	Sejarah	Koto Lamo	31,5 km	-
50.	Rumah Gadang Sei. Beringin	Budaya	Guguak	4 km	Mushola, Parkir, Toilet
51.	Medan Nan Bapaneh	Budaya	Tarantang	61 km	Mushola, Toilet, Parkir
52.	Perkampun- Ngan Tradisional Balubuih	Budaya	Balubuih	24 km	Perumahan, Mushola, Toilet
53.	Desa Wisata Saribu Gonjong	Budaya	Koto Tinggi	15 km	Perumahan, Mushola, Toilet

54.	Rumah Gadang Ukiran Cino	Budaya	Ampang Gadang	16 km	-
-----	-----------------------------	--------	------------------	-------	---

Sumber: Data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 54 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Destinasi tersebut didominasi oleh wisata alam dengan jumlah 33 destinasi, lalu 16 destinasi wisata sejarah dan 5 destinasi wisata budaya. Dari keseluruhan destinasi tersebut ada beberapa yang sudah memiliki fasilitas objek seperti sarana prasarana dan ada juga yang belum memiliki fasilitas sama sekali. Dari 54 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya adalah Desa Wisata Kampung Sarugo. Kampung Sarugo merupakan desa wisata yang berhasil meraih juara 2 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2020 dengan kategori kampung adat populer.

Kampung Sarugo terletak di Jorong Sungai Dadok, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh. Dengan jumlah penduduk \pm 800 jiwa daerah ini memiliki luas \pm 10 ha dengan ketinggian 800-1200 Mdpl pada wilayah perbukitan dengan tanah yang subur sehingga didominasi perkebunan dan pertanian. Sarugo berjarak sekitar 152 km dari Bandara Internasional Minangkabau dengan jarak tempuh 4 sampai 5 jam menggunakan kendaraan roda dua atau empat.

Gambar 1.1

Gambar Wilayah Desa Sarugo di Jorong Sungai Dadok, Kenagarian Koto Tinggi



Sumber: Kemenparekraf Tahun 2023

Nama Sarugo merupakan akronim dari kata Saribu Gonjong dikarenakan terdapat banyak rumah gadang di desa wisata ini. Rumah gadang merupakan rumah kaum atau suku yang digunakan sebagai tempat pertemuan bagi setiap suku dalam mendidik anak kemenakan. Uniknya rumah gadang yang berada disini telah berdiri berpuluh tahun yang lalu dan semuanya berbaris rapi menghadap matahari terbit dengan jumlah 9 shaf dan beratapkan gonjong lima. Gonjong 5 ini melambangkan 5 rukun islam sesuai dengan falsafah minang “adat basandi sara’, sara’ basandi kitabullah”.

Sejak 4 tahun diresmikan, desa wisata Kampuang Sarugo mampu meraih beberapa prestasi atau penghargaan. Penghargaan pertama yang didapat yaitu Kampuang Sarugo ditetapkan sebagai Smart Branding Kabupaten Lima Puluh Kota pada November 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 desa wisata Kampuang Sarugo berhasil meraih juara dua kategori

desa wisata yaitu kampung adat terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API Award) yang diadakan oleh Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

Gambar 1.2 Penyerahan tropi dan piagam penghargaan untuk Kampung Sarugo sebagai juara 2 pada Anugerah Pesona Indonesia (API) Award sebagai Kampung Adat Terpopuler tingkat nasional.



Sumber: Antara News.2021

Desa Sarugo berhasil meraih juara 2 pada ajang API Award setelah berkompetisi dengan beberapa nominasi lain yaitu desa adat Gumantar di Kabupaten Lombok Utara, Tongkonan Karuaya di Kabupaten Tana Toraja, Kampung adat Namata di Kabupaten Sabu, desa Pampang di Kota Samarinda, Kasepuhan Ciptagelar di Kabupaten Sukabumi, Pelang Kenidai di Kota Pagar Alam, Rumah Betang Saham di Kabupaten Landak, rumah tuo Rantau Panjang di Kabupaten Merangin dan setulang di Kabupaten Malinau.

Penghargaan selanjutnya yang diraih oleh Desa Sarugo yaitu berhasil menjadi juara 1 POKDARWIS atau Kelompok Sadar Wisata terbaik se-Sumatera Barat pada tahun 2021.

Gambar 1.3 Penerimaan penghargaan Juara 1 POKDARWIS terbaik tingkat Sumatera Barat tahun 2021



Sumber: Dekadepos.com.2021

Penghargaan selanjutnya yang diraih oleh Kampung Sarugo yaitu pada tahun 2021 Kampung Sarugo berhasil meraih juara IV kategori homestay dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan menjadi salah satu dari 4 desa wisata di Sumatera Barat yang berhasil meraih penghargaan dalam tingkat nasional.

Saat ini Desa Sarugo dikelola oleh beberapa pihak yang ikut andil dalam pengembangannya. Hal ini sesuai dari wawancara sebagai berikut:

“Saat ini dalam pengelolaan Sarugo dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Sarugo serta beberapa pihak lain yang ikut berperan di dalamnya. Pihak tersebut diantaranya yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Sumatera Barat.” (Wawancara dengan Fauziah Sri Karmala, M.Pd selaku anggota Pokdarwis Desa Sarugo, 1 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa saat ini pengelolaan Desa Sarugo dilakukan oleh Pokdarwis Desa Sarugo dengan kolaborasi bersama beberapa pihak yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lima Puluh Kota, Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumatera Barat dan Fakultas Pariwisata UMSB.

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pihak yang ikut berkolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo. Namun dalam keterlibatannya, peran yang dimiliki tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan setiap destinasi wisata merupakan kepemilikan dari daerah yang bersangkutan dan pihak provinsi hanya berperan dalam memberikan pendampingan atau pembinaan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa:

“Yang memiliki desa wisata itu kan Kab/Kota. Maka dari Dinas Pariwisata Provinsi ini sifatnya pembinaan terhadap desa wisata. Ketika sudah dapat desa wisata yang terbaik itu, maka lebih fokus kesana yang difokuskan sekarang adalah pelatihan-pelatihan, Bidang destinasi itu pembinaan dan juga ada tim pemberdayaan dan pengembangan desa wisata (TP2 DEWI).”
(Wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Anastasia, S.E 18 Desember 2023)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan Desa Sarugo ini yaitu memberikan pembinaan dan pelatihan. Dikarenakan setiap destinasi wisata merupakan kepemilikan dari Kabupaten atau Kota maka dinas pariwisata provinsi tidak bisa ikut campur terlalu dalam terkait pengelolaannya. Namun lebih kepada memberikan pembinaan atau pendampingan. Bentuk pembinaan yang dilakukan ini yaitu pada awalnya beberapa desa wisata ini akan di seleksi dan setelah didapatkan yang terbaik barulah berfokus ke yang terbaik tersebut.

Pada tahun 2021 ada ajang yang diadakan yaitu Pokdarwis Award yang diikuti kurang lebih 200 pokdarwis yang kemudian diadakan seleksi dan penilaian. Dari seleksi tersebut Desa Sarugo menjadi juara 1 dan didatangi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu

Sandiaga Uno. Dari wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa:

“Jadi tahun 2021 kemaren ada Pokdarwis Award yaitu lebih kurang dari 200 pokdarwis, diadakan seleksi atau penilaian. Dan didapatkan 5 pokdarwis yang terbaik, salah satunya yang juara 1 di Desa Wisata Sarugo di Koto Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota dan didatangi oleh Menteri Parekraf yaitu Sandiaga Uno. Desa Wisata Kampung Sarugo ini memiliki kelembagaan yang bagus, dengan anak-anak muda yang membangun desanya dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan yang awalnya dicemooh, lalu setelah dikenal dan banyak orang berkunjung akhirnya bagus. Desa Wisata Sarugo ini termasuk desa agro tadi, karena ada jeruk sebagai komoditas utamanya. Di Kampung Sarugo itu sudah ada homestay, dimana rumah-rumah penduduk itu disewakan. Pengembangan sebuah desa wisata dilihat dari penggerakannya yang harus dari masyarakat, jangan dari pemerintah terus. Bagaimana para anak mudanya kompak dalam pengembangan desa wisata ini. Itu salah satu dari beberapa indikator yang dinilai. Jadi percuma desa wisata ini dibangun kalau tidak ada orang-orang penggerakannya. (Wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Anastasia, S.E 18 Desember 2023).

Dari wawancara di atas diketahui bahwa sebuah desa wisata tidak dapat berkembang dengan optimal apabila pelaku pariwisata terutama anak muda dari desa tersebut tidak memiliki kemauan yang keras dan kompak dalam mengembangkan desanya. Dari wawancara diatas juga dapat dilihat bahwa peran dari Dinas Pariwisata Provinsi yaitu memberikan pembinaan dan pelatihan kepada desa wisata.

Pada tahun 2021 ada 3 desa wisata yang masuk ke dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia yaitu desa wisata Kampuang Sarugo, Desa Wisata Sungai Batang dan Desa Wisata Sumpu. Maka pada tahun 2022 dilakukan pendampingan kepada 3 desa wisata tersebut. Setelah didapatkan desa wisata terbaik itu kemudian yang pertama dilakukan adalah workshop rencana aksi, yang dimulai dari pemetaan apa yang kira-kira akan dilakukan. Setelah diperoleh rencana aksi kemudian tim akan turun ke lapangan dan stay disana selama 3 hari. Lalu desa wisata itu disuruh untuk membuat sebuah event di daerahnya atau membuat brand dan akun instagram

untuk promosi serta jika butuh perbaikan maka disitulah akan dilakukan pendampingan dengan melakukan perbaikan brand-brand tersebut.

Setelah diberikan pendampingan seperti itu lalu dilakukan evaluasi dalam jangka beberapa bulan setelah pendampingan. Untuk evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Tim Sanak serta mengundang beberapa perwakilan dari masing-masing desa wisata yaitu wali nagari, pokdarwis, pelaku ekraf dan bundo kanduang. Masing-masing dari desa wisata itu mengutus 8 orang perwakilan yang hadir pada evaluasi ini. Peran dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Sarugo yaitu dengan memberikan pendampingan melalui berbagai pelatihan kepada para pelaku pariwisata yang terdiri dari masyarakat pada Desa Sarugo.

Selain adanya peran dari Dinas Pariwisata Provinsi, pada tingkat Kabupaten Dinas Pariwisata juga memiliki peran dalam pengembangan Desa Wisata Sarugo. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Taufik Noviandri selaku Wakil Sekretaris Pokdarwis Sarugo saat wawancara yaitu:

“Selain adanya peran dari Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota juga turut berperan dalam pengelolaan Desa Sarugo. Lalu pihak swasta yaitu kerjasama dengan HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia sebagai pihak yang membantu mempromosikan Desa Sarugo.” (Wawancara dengan Taufik Noviandri selaku Wakil Sekretaris Pokdarwis Sarugo, 31 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan Desa Sarugo saat ini juga ada peran dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu mengadakan pelatihan pelaku desa wisata yang diadakan selama 1 minggu di Harau. Lalu bimbingan teknis untuk pembina atau penasehat desa wisata dan uji kompetensi kinerja yang kemudian diberikan

sertifikat. Selain itu juga terdapat keterlibatan pihak swasta yaitu adanya kerjasama antara Sarugo dengan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Sumatera Barat. HPI ini berperan dalam mempromosikan dan menjual paket wisata di Desa Sarugo yang kemudian memberikan respon terhadap kebutuhan wisatawan.

Selain keterlibatan pihak swasta, Sarugo juga mulai diekspos oleh beberapa media. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau untuk media mungkin sudah banyak. Diantaranya yaitu TV Nasional dan Sumbar seperti TVRI Sumbar, MNCTV, GTV dan Indosiar yang sudah pernah memberitakan tentang Sarugo. Lalu berkat kerjasama dengan Trans 7 sehingga Desa Sarugo terpilih sebagai tempat kegiatan shooting Si Bolang pada tahun 2021, Jejak Petualang tahun 2021 dan 2023. Dan Sarugo juga pernah menjadi lokasi shooting film layar lebar Begadang Rendang pada tahun 2021. Kegiatan itu dilaksanakan selama 15 hari dengan menggunakan properti dari barang masyarakat setempat dan termasuk pemain figuran sebanyak 50 orang dari masyarakat.” (Wawancara dengan Taufik Noviandri selaku Wakil Sekretaris Pokdarwis Sarugo, 31 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa telah ada kerjasama atau keterlibatan pihak media dalam pengelolaan Desa Sarugo. Beberapa media tersebut yaitu siaran televisi trans 7. Sarugo sudah pernah diliput dalam siaran jejak petualang dan si bolang. Dan juga sudah pernah diberitakan media tv lain seperti GTV, MNC TV dan Indosiar. Lalu di Sarugo ini juga pernah menjadi lokasi shooting film layar lebar yaitu Begadang Rendang selama 15 hari.

Pihak selanjutnya yang tak kalah penting dalam pengelolaan Sarugo yaitu akademisi. Yang merupakan akademisi disini yaitu Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Fakultas ini merupakan cikal berdirinya Desa Sarugo karena sejarah pembentukan Sarugo diinisiasi oleh beberapa mahasiswa yang mengikuti KKN di jorong ini. Mahasiswa melihat adanya potensi dari desa ini yang bisa dikembangkan, maka atas kerjasama

mahasiswa dengan masyarakat dan fakultas pariwisata UMSB pada tanggal 31 Agustus 2019 resmilah desa ini menjadi desa wisata yang bernama Desa Saribu Gonjong atau Sarugo.

Meskipun telah memperoleh banyak penghargaan pengelolaan Desa Wisata Kampung Sarugo ini masih perlu beberapa pembenahan agar lebih optimal. Hal ini dikarenakan destinasi wisata ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas dan masih sedikit kunjungan baik itu dari segi domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, jumlah kunjungan wisatawan ke kampung Sarugo pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan ke Kampung Sarugo tahun 2019-2023

NO	Bulan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari	-	60	135	181	387
2	Februari	-	128	119	143	282
3	Maret	-	116	523	111	172
4	April	-	-	92	56	245
5	Mei	-	-	184	127	77
6	Juni	-	112	214	98	203
7	Juli	-	265	116	231	217
8	Agustus	-	253	123	314	304
9	September	19	180	254	58	5
10	Oktober	77	93	66	114	146
11	November	71	120	226	89	49
12	Desember	78	133	83	121	27
Total		245	1.460	2.135	3.520	2.956

Sumber: Pokdarwis Kampung Sarugo dan data diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kunjungan wisatawan ke Kampung Sarugo masih berskala kecil setiap bulan dan jumlah pengunjung yang datang tidak menentu. Pada tahun 2019 sangat sedikit kunjungan wisatawan yaitu hanya 245 orang pengunjung. Hal ini dikarenakan

adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar akibat dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan juga belum stabil karena masih era new normal pasca covid-19. Namun sudah mulai ada peningkatan jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 1.460 orang pengunjung. Dan sejak tahun 2021 hingga 2023 jumlah kunjungan mulai terus mengalami peningkatan. Namun jumlah kunjungan ini masih belum stabil dan tidak menentu setiap bulannya.

Agar jumlah kunjungan bisa mengalami peningkatan maka dibutuhkan pengelolaan optimal dalam menciptakan sebuah desa wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pengelolaan yang optimal di desa wisata Kampuang Sarugo ini membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak. Apabila dikelola secara baik dan maksimal maka tentu dapat diperoleh pula hasil yang lebih optimal hingga Sarugo ini bisa lebih dikenal dan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Kerjasama yang dilakukan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun dibutuhkan kerjasama dari pihak lain agar terjalin suatu hubungan kolaborasi yang mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata harus mampu memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan baru.

Adanya kerjasama dari berbagai sektor merupakan konsep dari *Collaborative governance*. Dalam proses *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu pembangunan kepercayaan, komitmen untuk berproses, pemahaman bersama tentang tujuan dan strategi, perantara hasil dan dialog tatap muka. Selain itu juga dibutuhkan pembagian peran antara berbagai aktor dalam mencapai *Collaborative Governance*.

Secara umum aktor dalam *Collaborative Governance* dikelompokkan menjadi 3 sektor utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sektor pemerintah yang termasuk yaitu pemerintah di berbagai wilayah administratif, mulai dari pemerintah tingkat pusat hingga pemerintah lokal. Lalu sektor swasta disini yaitu para pengusaha atau pelaku industri usaha pariwisata sebagai pelaku langsung pariwisata. Dan sektor yang tak kalah penting yaitu masyarakat yang didalamnya termasuk tokoh masyarakat, intelektual, LSM dan media yang berfungsi sebagai penggerak utama dan pendukung pariwisata.

Dalam pengelolaan desa wisata Kampuang Sarugo pihak yang berkolaborasi antara lain pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Lalu pihak swasta yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPC Sumatera Barat. Akademisi yaitu Fakultas Pariwisata UMSB dan kolaborasi dengan masyarakat atau LSM yaitu dengan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sarugo. Maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sudah ada keikutsertaan beberapa aktor dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di desa wisata ini.

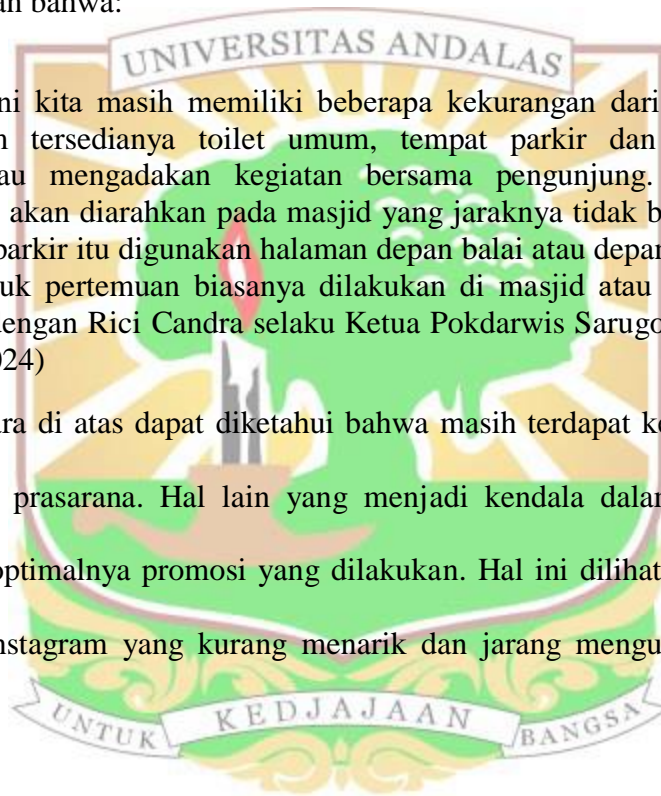
Dari serangkaian proses kolaborasi yang telah dilakukan, masih ditemukan permasalahan yang diduga disebabkan karena belum optimalnya proses kolaborasi. Dari observasi awal yang dilakukan, masalahnya yaitu belum tersedianya jaringan komunikasi atau internet di desa wisata ini. Hal ini menjadikan wisatawan yang akan datang untuk berkunjung kesulitan menemukan desa wisata ini karena tidak bisa diakses melalui google maps. Fenomena ini peneliti temukan dari beberapa kritikan dan saran yang ada pada buku tamu Desa Wisata Sarugo. Seperti yang ditulis oleh Bukhari yang merupakan pengunjung dari Pekanbaru pada tanggal 30 April 2023. Bukhari menuliskan pesan yaitu “Usahakan jaringan internetnya ada”.

Selain akses komunikasi, Desa Sarugo memiliki kekurangan lain yaitu akses jalan menuju Desa Sarugo yang rusak. Ada beberapa titik jalan menuju Desa Sarugo yang berlubang apalagi disaat musim hujan tiba maka jalan akan menjadi licin dan susah untuk dilalui baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Hal lain yang menjadi kekurangan di Desa Sarugo sendiri yaitu belum lengkapnya sarana prasarana seperti toilet umum, tempat parkir, dan ruang pertemuan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rici Candra selaku Ketua Pokdarwis Sarugo, menyampaikan bahwa:

“Untuk saat ini kita masih memiliki beberapa kekurangan dari segi fasilitas. Seperti belum tersedianya toilet umum, tempat parkir dan ruang untuk pertemuan atau mengadakan kegiatan bersama pengunjung. Untuk toilet biasanya tamu akan diarahkan pada masjid yang jaraknya tidak begitu jauh dan untuk tempat parkir itu digunakan halaman depan balai atau depan rumah warga sementara untuk pertemuan biasanya dilakukan di masjid atau di balai adat” (Wawancara dengan Rici Candra selaku Ketua Pokdarwis Sarugo, pada tanggal 17 Februari 2024)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat kekurangan Desa Sarugo dari segi sarana dan prasarana. Hal lain yang menjadi kendala dalam pengembangan Desa Sarugo yaitu belum optimalnya promosi yang dilakukan. Hal ini dilihat dari akun sosial media Desa Sarugo yaitu instagram yang kurang menarik dan jarang mengupdate info terbaru dari Sarugo.

Dari serangkaian proses kolaborasi yang telah dilakukan masih belum optimal peran setiap aktor dalam proses kolaborasi. Hal ini bisa dilihat dari masih belum optimalnya keterlibatan beberapa aktor, sehingga peran antar aktor tersebut belum terlihat secara nyata dan jelas. Dilihat dari aktor yang terlibat dalam kolaborasi tata kelola desa Sarugo ini, sejalan dengan konsep kolaborasi *penta helix*. Latar belakang konsep *penta helix* dibangun atas dua model



kolaborasi sebelumnya yaitu *triple helix* dan *quadra helix*.⁴ Dalam model kolaborasi *penta helix* terdiri dari 5 pemangku kepentingan yaitu Pemerintah (*Government*), dunia usaha/swasta (*Business*), akademisi (*Academician*), masyarakat madani (*Civil Society*), media massa (*Mass Media*). Hal yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana aktor-aktor tersebut terlibat dalam proses kolaborasi yang mana untuk menganalisis hal tersebut peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash, yang terdiri dari empat variabel yaitu:

1. Kondisi awal kolaborasi
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Institusional
4. Proses Kolaborasi

Dilihat dari kondisi awal kolaborasi yaitu berkaitan dengan kapasitas sumber daya dan fungsi serta peran masing-masing aktor dalam berkolaborasi. Kapasitas disini maksudnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh aktor di awal kolaborasi. Dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo ini terdapat ketidakseimbangan sumber daya yaitu ketidakmampuan masyarakat atau pokdarwis dalam mengelola desa wisata, maka dari itu pemerintah melakukan kolaborasi dengan menggandeng aktor lain dalam pengembangan Desa Sarugo. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti sebagai berikut:

“..kita dari pihak pokdarwis ini kan baru kali ini di bidang pariwisata dan memang belum sepenuhnya memahami terkait pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu masih perlu untuk terus belajar dan melatih diri tentang bagaimana mengelola desa ini..” (Wawancara dengan Fauziah Sri Karmala, M.Pd selaku sekretaris pembantu Pokdarwis Desa Sarugo, 1 November 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pokdarwis selaku pihak pengelola utama Desa Sarugo belum sepenuhnya memahami terkait pengelolaan pariwisata. Hal ini menjadi salah

⁴Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik.

satu alasan terjadinya kolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo. Dalam hal pemberian insentif dalam berkolaborasi, yaitu adanya dana khusus untuk pengelolaan pariwisata. Namun dalam kolaborasi Desa Sarugo, tidak ada dana khusus yang dianggarkan oleh seluruh aktor. Bantuan yang diberikan berupa non tunai yaitu berupa pelatihan dan pembinaan. Hal ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

“..Kalau dana khusus dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan Sarugo itu tidak ada. Mereka lebih memberikan berupa program atau pelatihan-pelatihan misalnya dari Dinas pariwisata. Kalau untuk bantuan itu kita ada menerima tapi lebih seringnya dari pemerintah pusat. Seperti pada tahun 2021 itu Sarugo menerima bantuan 120 juta dari Kemenparekraf..” (Wawancara dengan Rici Candra selaku Ketua Pokdarwis Sarugo, pada 17 Februari 2024)

Selanjutnya jika dilihat dari variabel kedua teori Ansell dan Gash yaitu terkait kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan melalui penetapan kebijakan, memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Dalam pelaksanaan kolaborasi Desa Sarugo didasari oleh kebijakan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota No.74 tahun 2020 tentang penetapan nagari wisata. Dan Desa Sarugo merupakan 1 dari 4 destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota selain Harau, Kapalo Banda Taram dan Sungai Kamuyang. Maka atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjalin kolaborasi dengan pihak lain untuk pengembangan Desa Sarugo ini. Selanjutnya mengenai memfasilitasi dialog dilakukan oleh pokdarwis namun belum ada forum yang mempertemukan seluruh pihak yang berkolaborasi dalam Desa Sarugo. Karena dalam memfasilitasi dialog yang dilakukan oleh pokdarwis itu hanya dihadiri oleh pokdarwis bersama seluruh lapisan masyarakat.

Kepemimpinan yang dimaksud dalam kolaborasi ini adalah pemimpin dari setiap aktor yang berkolaborasi. Pada kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo pokdarwis merupakan aktor utama atau pengelola utama dari Desa Sarugo. Pokdarwis berperan sebagai penghubung dalam

kolaborasi dengan aktor lain. Fungsi pihak lain disini yaitu seperti Disparpora Lima Puluh Kota adalah sebagai penanggung jawab dalam setiap hal terkait pengembangan Desa Sarugo karena program yang menyangkut pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah hal yang banyak menyangkut Dinas Parpora ini. Sedangkan pihak lain yaitu Dinas Pariwisata Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas, Himpunan Pramuwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan akademisi dipimpin oleh seorang dekan pada tingkat fakultas.

Dalam pengelolaan Desa Sarugo ini para aktor turut berkontribusi dan bentuk partisipasi yang diberikan juga bermacam-macam. Dari Pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten bentuk partisipasinya berupa pelaksanaan program dari masing-masing dinas untuk pengelolaan Desa Sarugo. Seperti Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat itu memberikan bimbingan teknis sadar wisata, sedangkan dari Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu program peningkatan SDM pelaku pariwisata. Sedangkan HPI dan UMSB itu memberikan kontribusi juga lebih berupa pembinaan dan pelatihan. Dan untuk pokdarwis sendiri merupakan pengelola utama dari Desa Sarugo yang merasakan dampak dari semua kontribusi yang diberikan oleh pihak yang berkolaborasi.

Aturan dasar dalam proses kolaborasi merupakan dokumen kerjasama antar aktor yang berkolaborasi. Namun dalam pengelolaan Desa Sarugo, tidak ada aturan yang dimiliki semua aktor dalam berkolaborasi. Hanya ada dokumen antara Dinas Parpora Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Fakultas Pariwisata UMSB. Untuk pihak lain itu tidak ada aturan atau dokumen tertulisnya.

Selanjutnya dalam proses kolaborasi pertemuan tatap muka rutin ada dilakukan oleh pokdarwis Desa Sarugo bersama masyarakat. Namun pertemuan tatap muka seluruh aktor itu

tidak ada, hanya para aktor tersebut sesekali datang ke Desa Sarugo untuk melakukan peninjauan dan evaluasi. Maka dapat dilihat bahwa peranan aktor yang berkolaborasi belum berjalan maksimal yang dilihat dari tidak adanya pertemuan rutin antara pihak pokdarwis dengan *stakeholder* yang berkolaborasi. Sebagaimana wawancara dengan narasumber:

“Kalau pokdarwis ada melakukan pertemuan rutin membahas rencana dan evaluasi ke depan. Tapi dengan dinas-dinas atau pihak lain itu kita tidak ada melakukan pertemuan rutin biasanya mereka hanya melakukan kunjungan ke Sarugo untuk melakukan evaluasi atau pembinaan” (Wawancara dengan Rici Candra selaku Ketua Pokdarwis Sarugo, pada tanggal 17 Februari 2024)

Terkait membangun kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi lancarnya proses kolaborasi yang dilakukan. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya persamaan persepsi masyarakat tentang pariwisata. Maka ini terus menjadi pr yang diupayakan seluruh pihak agar tercapai persepsi yang sama di masyarakat. Komitmen setiap aktor dalam kolaborasi didukung atas kesadaran akan tanggung jawab dan hak masing-masing aktor. Dimana tujuan yang ingin dicapai yaitu pengelolaan Desa Sarugo yang lebih baik dan diwujudkan dengan adanya komitmen yang kuat oleh seluruh aktor. Komitmen ini ditunjukkan berupa kontribusi yang diberikan baik berupa dana tunai maupun berupa program-program.

Dari serangkaian proses kolaborasi yang dilakukan tentu ada dampak sementara yang telah tercapai dalam kolaborasi yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo, pencapaian hasil sementara yang diperoleh yaitu Desa Sarugo mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan. Meskipun jumlah kunjungan belum banyak, namun dengan adanya Desa Sarugo ini masyarakat setempat juga merasakan dampaknya dalam perekonomian. Seperti warung-warung masyarakat menjadi ramai pembeli karena adanya wisatawan ini. Namun dampak yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal dan merata. Paling yang baru

merasakan adalah para pedagang yang kedainya menjadi lebih ramai karena adanya pengunjung atau wisatawan dari luar. Sedangkan untuk sektor lain, masyarakat belum merasakan dampak yang besar. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti bersama seorang masyarakat yang berdagang di Desa Sarugo sebagai berikut:

“Sejak adonyo Desa Sarugo ko alhamdulillah lopou jadi rami dek banyak wisatawan yang datang dan balanjo di lopou kami. Kalau pas covid itu yobona longang dek ndak buliah aktifitas dilua kan, sejak ndak ado covid iyo toraso perbedaannyo. Apolai pas hari-hari libur alhamdulillah lopou tambah rami pulo.” (Wawancara peneliti dengan Della selaku pedagang di Desa Sarugo, 24 April 2024)

Penelitian mengenai kolaborasi pada bidang pariwisata telah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Azhari yang berbicara tentang Kolaborasi dan Kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata Alam:Kendala dan Prospeknya di Era Otonomi Daerah.⁵ Abd.Kadir W.San Afri Awang,Ris Hadi Purwanto dan Erny Poedjirahajoe yang berbicara tentang Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimulung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan.⁶ Penelitian yang lainnya yaitu Kolaborasi Antar *Stakeholders* Penta Helix dalam Pengembangan Kota Kreatif (Studi Kota Malang) oleh Mohammad Rozikin pada tahun 2019.⁷

Pengkajian yang dilakukan peneliti terdahulu lebih banyak pada manajemen dan pengembangan namun lokus setiap peneliti berbeda.⁸ Pengelolaan pariwisata yang dilakukan

⁵ Abdul Kholiq Azhari.2017.Kolaborasi dan Kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata Alam:Kendala dan Prospeknya di Era Otonomi Daerah.Journal of Tourism and Creativity,1(2).

⁶Abd.Kadir W.,San Afri Awang,Ris Hadi Purwanto dan Erny Poedjirahajoe.2013.Analisis Stakeholders dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimulung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan.Jurnal Manusia dan Lingkungan Hidup,20(1),11-21.

⁷Mohammad Rozikin.2019.Kolaborasi Antar *Stakeholders* Penta Helix dalam Pengembangan Kota Kreatif studi kasus Kota Malang.PANGRIPTA: Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan,2(2).

⁸Dina Gustia Ningsih. 2023. *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata *Geopark* Silokek di Kabupaten Sijunjung. Skripsi. Padang. Program Studi Administrasi Publik Universitas Andalas.

para peneliti terdahulu sudah ada namun penelitian di bidang *Collaborative Governance* pada desa wisata ini masih minim ditemukan. Maka penelitian ini berbeda dan memiliki kebaruan dari penelitian terdahulu. Yang mana pada penelitian ini akan berfokus pada proses kolaborasi dan peran para *stakeholders* dalam pengelolaan desa wisata Kampuang Sarugo.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan Desa Sarugo telah mampu meraih beberapa prestasi dan penghargaan yang akan memudahkan dalam melaksanakan berbagai kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*. Namun peneliti menemukan masih belum banyak dikenalnya Desa Sarugo yang bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang masih sedikit dan tidak menentu. Hal ini diduga terjadi karena proses kolaborasi yang belum optimal yang bisa dilihat pada belum lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia dan juga belum tersedianya jaringan internet di desa wisata Kampuang Sarugo tersebut.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana *Collaborative Governance* yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat maupun berbagai *stakeholder* terkait lainnya dalam pengelolaan desa wisata Kampuang Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana *Collaborative Governance* dalam tata kelola desa wisata Kampuang Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait *Collaborative Governance* dalam tata kelola desa wisata Kampuang Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya pada departemen Administrasi Publik terkhusus konsentrasi Manajemen Publik di bidang *Collaborative Governance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai *Collaborative Governance* dalam tata kelola desa wisata Kampung Sarugo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada desa wisata Kampung Sarugo dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengembangan desa wisata.

